

PEMKOT DIDUKUNG TERUS TEGAKKAN ATURAN

Ratusan Reklame Bernuansa Politik Ditertibkan

YOGYA (KR) - Menjamurnya reklame yang bernuansa politik jelang pendaftaran pasangan calon walikota dan wakil walikota tidak bisa terekakkan. Namun demikian iklan luar ruang tersebut juga tidak sedikit yang melanggar aturan. Sat Pol PP Kota Yogya bahkan sudah menertibkan hingga ratusan reklame yang dipastikan melanggar.

Kepala Sat Pol PP Kota Yogya Octo Noor Arafat, menjelaskan reklame yang ditertibkan memiliki bentuk pelanggaran yang beragam. Sebagian dipastikan tidak berizin namun ada pula yang berizin namun lokasi pemasangannya tidak sesuai ketentuan dalam perda maupun perwal. "Ada sekitar 230 alat peraga sosialisasi yang sudah ditertibkan," tandasnya,

Jumat (9/8).

Pelaksanaan penertiban itu mendasarkan pada Perda Kota Yogya Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame. Dalam perda itu mengatur reklame termasuk iklan politik harus memperoleh izin dan membayar pajak reklame. Sebagian pelanggaran yang ditemukan ialah pemasangan reklame sudah dilakukan na-

mun proses izin baru diurus belakangan. Awalnya Sat Pol PP Kota Yogya sudah menertibkan kurang lebih 15 baliho bermuatan pencalonan Pilkada yang tidak berizin. Namun demikian yang bersangkutan atau pemasang sudah menyampaikan kalau reklame itu sudah berproses untuk mendapatkan perizinan. Oleh sebab itu Sat Pol PP Kota Yogya mempersilakan pemasang mengambil kembali reklame yang ditertibkan dan harus memasang stiker tanda perizinan maupun pembayaran pajak reklame. "Ada juga yang sudah berizin tapi salah penempatan. Misalnya diikatkan di pohon, tiang penerangan jalan umum, dan ada juga yang dipasang di pa-

gar kantor pemerintah," imbahnya.

Dirinya menegaskan ketentuan pemasangan reklame sudah diatur sesuai ketentuan dalam perda. Hal itu tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf d bahwa reklame tidak boleh dipasang di pohon, tiang listrik, tiang telepon dan atau rambu-rambu lalu lintas. Diharapkan masing-masing tim yang mendukung calon-calon tertentu bisa mencermati dan mentaati ketentuan perda. "Yang paling penting meskipun sudah berizin dan memasang stiker perizinan, tetapi penempatannya harus tetap sesuai dengan ketentuan aturan," tandasnya.

Namun demikian, Octo mengutarakan pihaknya juga

tidak bekerja sendiri melainkan berkolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogya, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya. Octo berharap jika masih ada yang memasang tidak sesuai ketentuan agar ditertibkan secara mandiri.

Kepala DPMPTSP Kota Yogya Budi Santosa, menjelaskan reklame yang bermuatan politik pencalonan Pilkada sebelum pelaksanaan kampanye maka jenisnya disamakan dengan reklame produk lainnya. Sehingga ketentuannya harus sesuai regulasi perda reklame. "Jumlah reklame yang bermuatan pencalonan

pilkada, harus dilihat satu persatu karena tidak ada perbedaan reklame dengan konten itu," jelasnya.

Sementara Forpi Kota Yogya akan terus mendukung langkah Pemkot dalam menegakkan aturan. Menurut anggota Forpi Kota Yogya Baharudin Kamba, pelanggaran baliho bakal calon walikota seharusnya tidak perlu terjadi jika semua pihak termasuk tim relawan patuh terhadap aturan yang ada. "Urus izin dulu lah baru baliho, reklame, baner dan sejenisnya dipasang pada tempatnya. Sesuai aturan yang ada. Jangan pasang baliho atau reklame terlebih dahulu, baru mengurus izin kemudian," katanya. **(Dhi)*-1-f**

BERHARAP KOORDINASI TERUS DILAKUKAN

Raih WTP 14 Kali, Pemda DIY Apresiasi BPK

YOGYA (KR) - Pemda DIY mengapresiasi kinerja BPK RI Perwakilan DIY. Kolaborasi dan sinergi yang ditunjukkan BPK RI Perwakilan DIY dengan Pemda DIY mewujudkan tren positif, dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 14 kali berturut-turut.

"Saya berharap BPK terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemda DIY, guna menaikan tugas pengabdian pada masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu atas nama pribadi maupun mewakili Pemda DIY saya berterima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK DIY (Widhi Widayat) atas kontribusi dan pengabdian selama ini," kata Wakil Gubernur (Wagub) DIY, Sri Paku Alam X pada acara serah terima jabatan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DIY di Kantor Perwakilan

BPK DIY, Jumat (9/8).

Serah terima jabatan dilakukan antara Widhi Hidayat, selaku Kepala Perwakilan BPK DIY yang saat ini telah purna tugas, kepada Agustini Sugihartatik, yang kini menjabat Kepala Perwakilan BPK DIY.

Paku Alam X mengatakan, berbagai penghargaan yang diterima oleh Pemda DIY tidak lepas dari dukungan para mitra, termasuk BPK RI Perwakilan DIY. Prestasi Pemda DIY mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 14 kali, menjadi bukti kerja bersama dengan BPK RI Perwakilan DIY berjalan dengan sinergis, konstruktif, dan profesional.

Sementara itu, Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit menyampaikan, momentum penting memiliki arti substansial dalam menjaga kontinuitas dalam menjaga tugas dan fungsi organisasi. Oleh karena

itu, perlu memaksimalkan kesempatan ini untuk terus mempererat komunikasi, membangun sinergi, dan kolaborasi serta meningkatkan koordinasi seluruh pemangku kepentingan dan mitra kerja di DIY.

"Sebagai organisasi yang dinamis, BPK melakukan promosi, rotasi dan mutasi secara terstruktur untuk memperkuat nilai dasar independensi, integritas, dan profesionalisme dalam budaya organisasi. Kegiatan ini bukan hanya sekadar kebutuhan organisasi semata, tetapi juga diharapkan untuk dapat meningkatkan kinerja di unit kerja yang baru," terangnya.

Menurut Ahmadi, BPK DIY telah meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. Keberhasilan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong penegakan integritas di wilayah DIY. **(Ria)-f**

TMMD, Dandim Terjun Berbaur Langsung



KR-Istimewa

Dandim berbaur dengan anggota dan masyarakat dalam suasana gembira tanpa membedakan.

YOGYA (KR) - Memberikan motivasi dan semangat pada anggota dan masyarakat, Komandan Satuan Tugas Tentara Manunggal Masuk Desa (Dansatgas TMMD) Reguler ke 121 Kodim 0734/Kota Yogyakarta, Letkol Inf Devy Kristiono SE MSi turun langsung ke lokasi kegiatan TMMD, pekan lalu di Kampung Mrican, Giwangan, Umbulharjo Kota Yogya.

"Selaku pimpinan, tak hanya memberikan perintah atau berada di kantor, dengan turun langsung ke lokasi

kegiatan TMMD menyuntikkan semangat agar pekerjaan bisa selesai sesuai target," ungkap Letkol Devy yang juga Dandim 0734/Kota Yogyakarta ini kepada KR di sela kunjungan.

Dandim berbaur langsung dengan anggota Satgas dan masyarakat untuk ikut bekerja di lokasi TMMD. "Berbaur bersama Satgas TMMD dan masyarakat dalam kegiatan fisik tanpa membedakan atasan dengan bawahan. Di lapangan itu kita sama," tegasnya. **(Vin)-f**

OPTIMIS TARGET TERCAPAI 100 PERSEN

Imunisasi Polio Tahap II Berakhir Pekan Depan

YOGYA (KR) - Program imunisasi polio atau Inactive Polio Vaccine (IPV) tahap II ditargetkan berakhir pekan depan pada Senin (12/8). Pemkot Yogyakarta optimis sasaran yang sudah ditargetkan bakal tercapai 100 persen meski pada tahap I lalu masih menyisakan dua persen.

Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogya Lana Unwanah, mengungkapkan imunisasi polio tahap I sudah digelar pada 15-21 Juli 2024 lalu dengan capaian 98 persen. Sedangkan tahap II sudah bergulir sejak 6 Agustus 2024 lalu. "Kami memaksimalkan betul pemberian imunisasi IPV tahap II yang berlangsung hingga 12 Agustus 2024," ungkapnya Jumat (9/8).

Program yang dibarengkan dengan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio ini pada tahap I di Kota Yogya sempat diproyeksikan menyasar 30.702 anak usia 0-7 tahun. Akan tetapi dalam pelaksanaannya berkurang menjadi 29.000 anak. Bagi anak yang pada tahap I belum sempat mendapatkan imunisasi IPV, maka orangtuanya diimbau segera menjangkau pos imunisasi terdekat.

Selama pemberian imunisasi polio hingga tahap II tidak banyak anak yang mendapatkan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Bahkan nyaris tanpa efek samping lantaran kurang dari satu persen. Apalagi imunisasi yang diberikan dalam bentuk oral sehingga cenderung rendah efek samping. Menurut Lana, adanya KIPI biasanya diakibatkan karena adanya alergi pada anak. "Memang belum banyak, tetapi kemungkinan karena anak memiliki alergi yang ada pada komponen di dalam vaksin itu sendiri. Ini relatif sangat jarang karena imunisasi ini melalui oral atau tetes jadi minim sekali terkena KIPI," ungkapnya.

Di samping itu, jalannya imunisasi sejauh ini juga sangat lancar. Peserta atau anak yang menjadi sasaran mampu datang sesuai jadwal. Sebagian yang tidak bisa datang sesuai jadwal dikarenakan sedang mengalami demam. Sehingga ketika sudah tidak demam bisa diberikan imunisasi di hari berikutnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Menular dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Yogya Endang Sri Rahayu, menambahkan PIN Polio yang diberikan pemerintah merupakan upaya dalam mencegah anak terkena polio. Namun menurutnya Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tetap menjadi modal penting dalam mencegah anak terdampak polio. Meski tidak ada temuan kasus polio di Kota Yogya namun langkah pemberian imunisasi IPV juga penting untuk diberikan. Hal ini karena Kota Yogya banyak dikunjungi wisatawan sekaligus kota tujuan pendidikan sehingga banyak warga dari luar daerah yang berdatangan.

Endang mengatakan penyakit polio merupakan infeksi menular karena berupa virus yang bisa masuk ke dalam tubuh. Selain itu, virus ini juga bisa memasuki aliran darah dan mengalir ke sistem saraf pusat dan bisa menyebabkan melemahnya otot dan bahkan dapat mengalami kelumpuhan. "Hingga saat ini memang tidak ada kasus. Pemberian imunisasi IPV ini merupakan bagian untuk memaksimalkan kekebalan tubuh terhadap penyakit polio. Tetapi PHBS tetap penting dilakukan masyarakat khususnya pada anak, dengan makan makanan sehat dan bergizi serta berolahraga," katanya. **(Dhi)-f**

Bawaslu Cermati Penyusunan DPS Pilkada 2024

YOGYA (KR) - Bawaslu DIY terus mencermati proses penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) oleh KPU kabupaten/kota. Bentuk pengawasan itu dengan memastikan bahwa sinkronisasi data yang diperoleh dari hasil pencocokan dan penelitian sesuai dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).

Selain itu pengawasan juga dilakukan terkait pemilih yang pada saat Pemilu lalu masuk ke dalam DPT, tetapi dalam proses pencocokan dan penelitian Pilkada sudah meninggal dunia sehingga harus dicoret atau gugur hak pilihnya.

"Proses pencocokan dan penelitian oleh Pantarlih beberapa waktu lalu kami telah berkoordinasi dengan KPU DIY. Jadi seandainya ada pemilih yang meninggal dunia

dan belum keluar akta kematiannya bisa dicoret dari daftar pemilih, asal ada surat dari pemerintah setempat," kata anggota Bawaslu DIY Umi Illiyina di Yogyakarta, Kamis (8/8).

Umi mengatakan, kesuksesan pelaksanaan Pilkada serentak pada November mendatang akan bisa terwujud apabila ada sinergitas dari sejumlah pihak termasuk Bawaslu, KPU dan masyarakat. Oleh karena itu pihaknya terus berupaya melakukan beberapa hal untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan Pilkada. Tentunya dengan terus memantau perkembangan terkini.

Salah satunya soal adanya informasi yang diperoleh dari KPU DIY dimana terdapat penambahan jumlah pemilih berdasarkan hasil pencermatan untuk Pilkada mendatang. Dimana dalam Pemilu lalu jumlah DPT DIY ada 2,8 juta

orang. Sementara data awal pemilihan Pilkada ada 2,89 juta orang. Namun untuk menambahkan 900.000 pemilih itu masih data sementara yang belum diplenokan. Penambahan itu kebanyakan dari pemilih pemula yang pada 27 November berusia 17 tahun dan sudah mendapatkan hak pilih.

Sementara itu sebelumnya Ketua KPU DIY Ahmad Shidqi menyatakan, setelah proses pencocokan dan penelitian selesai data yang diperoleh akan ditetapkan jadi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan DPS. Data itu akan diumumkan pada pekan pertama Agustus untuk menerima masukan dari masyarakat terhadap data yang telah dicoklit. Apabila masyarakat menemukan ada data yang salah tapi masuk ke dalam DPS bisa melaporkannya untuk segera diperbaiki sebelum ditetapkan menjadi DPT. **(Ria)-f**

BPKH Dukong Kolaborasi Strategis Bank Muamalat-Muhammadiyah untuk Umat

YOGYA (KR) - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memberikan apresiasi atas terjalannya kolaborasi antara Bank Muamalat, anak usaha BPKH, dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperluas program kemaslahatan umat di Indonesia.

Kerja sama ini secara resmi dimulai melalui penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan di Yogyakarta oleh Direktur Bank Muamalat, Karno, dan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, Jumat (9/8). Kesepakatan ini mencakup dua aspek utama, yaitu pemanfaatan jasa dan program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Muamalat untuk mendukung pengembangan cabang, ranting, dan masjid di bawah naungan Muhammadiyah, serta kolaborasi dengan Lazismu, lembaga zakat nasional



KR-Istimewa

Haedar Nashir menunjukkan komitmen Bank Muamalat pada pembiayaan sebesar Rp 2 triliun guna mendukung pengembangan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), termasuk rumah sakit, perguruan tinggi, pondok pesantren, dan masjid.

milik Muhammadiyah, dalam berbagai program pengelolaan keuangan dan zakat.

Dalam keterangan tertulisnya, Fadlul menyebutkan bahwa berbagai program yang telah didukung BPKH, seperti pembangunan Masjid At-Tanwir di Menteng, pengembangan Pondok Pesantren Muallimin, dan pengelolaan Rumah Sakit Bandung Barat, merupakan contoh

nyata sinergi antara BPKH dan Muhammadiyah. "Langkah ini menunjukkan komitmen kami untuk terus berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan umat," ungkap Fadlul.

Salah satu poin penting dari kerja sama ini adalah komitmen Bank Muamalat untuk menyediakan pembiayaan sebesar Rp 2 triliun guna mendukung pengembangan Amal Usaha

Muhammadiyah (AUM), termasuk rumah sakit, perguruan tinggi, pondok pesantren, dan masjid. Selain itu, Bank Muamalat juga akan berperan dalam pengelolaan keuangan terkait program haji di lingkungan Muhammadiyah, dengan tujuan untuk menciptakan proses yang aman, terjangkau, dan mudah diakses oleh jamaah.

Melalui kolaborasi ini, BPKH berharap dapat terus berkontribusi dalam upaya memajukan, mencerdaskan, dan mensejahterakan bangsa. "Kerja sama ini merupakan prototipe yang diharapkan membawa manfaat besar bagi umat dan bangsa, dengan fokus pada kebaikan bersama," pungkas Fadlul.

Dengan kerja sama yang erat antara Bank Muamalat dan Muhammadiyah, diharapkan akan tercipta sinergi yang kuat dalam berbagai bidang, terutama dalam mendukung kegiatan sosial dan pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. **(Jon)-f**